

- Kedua Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah ;
  2. Sekolah Swasta yang akan diwirakan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang berlaku .
  3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , tempat , kelompok , pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini , dan tidak dapat dialihkan kepada sihuk lain .
  4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , s.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman , selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1999 / 2000 ;
- Ketiga Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batas dengan sendirinya , apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan dan pembelitian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal : 19 Mei 1999

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Kantor Inspeksi Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sleman



MANDAR, S.Pd

130321637

**TEMBUSAN** Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Diljen Dikdasmen  
Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Dikdasmen Propinsi D.I. Yogyakarta
6. Kepala Bidang Perencanaan Dasar Kunciil Depdikbud  
Propinsi D.I. Yogyakarta.
7. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan  
Propinsi D.I. Yogyakarta
8. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud  
Kecamatan Kalasan
9. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.
10. Ketua Yayasan yang bersangkutan